

PREFERENSI PENGGUNAAN QRIS PADA PELAKU UMKM DAN KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Farah Putri Firsanty¹, Dyana Chusnulita Jatnika², Dian Permata Puspita³

¹Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

²Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

³Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi : farah.p.firsanty@unpad.ac.id

Submitted: 26-05-2022; Accepted: 12-08-2025; Published : 13-08-2025

ABSTRAK

Transaksi adalah salah satu dari kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu syarat terjadinya jual beli. Transaksi meliputi tipe tunai dan non-tunai. Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi non-tunai saat ini menjadi salah satu pilihan yang dipilih dalam kegiatan transaksi. Preferensi pelaku UMKM dan konsumen dalam menyediakan transaksi non-tunai QRIS menjadi hal yang penting untuk diteliti dengan tujuan mengetahui apa saja yang menyebabkan preferensi Pelaku usaha dan konsumen memilih transaksi non-tunai QRIS. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional dari James Coleman untuk menganalisis preferensi penggunaan QRIS pada pelaku UMKM dan konsumen di Kota Bandung. QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran berbasis QR dalam satu standar. Teori pilihan rasional melihat tindakan atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh suatu pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan, sehingga pilihan dalam bertindak terbentuk dari tujuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yang dilakukan bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai preferensi penggunaan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis ditemukan identifikasi aktor, tujuan, dan sumber daya dalam pilihan rasional meliputi pelaku UMKM, konsumen UMKM, penyedia jasa pembayaran (PJP), Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bandung mengarah kepada memilih untuk menggunakan transaksi QRIS untuk mencapai tujuan masing-masing.

Kata kunci: Pilihan Rasional, QRIS, UMKM

ABSTRACT

Transactions are one of the economic activities that are one of the requirements for buying and selling. Transactions include cash and non-cash types. Along with technological advances, non-cash transactions are currently a preferred option in economic activities. The preferences of MSMEs and consumers in providing non-cash QRIS transactions are important to study in order to find out what causes the preferences of MSMEs and consumers to choose non-cash QRIS transactions. This study uses James Coleman's rational choice theory to analyze the preferences for using QRIS among MSMEs and consumers in Bandung City. QRIS is designed to unify various QR-based payment services in one standard. Rational choice theory sees a person's actions or behavior as influenced by certain considerations with a purpose, so that the choice to act is formed from that purpose. The method used in this study is descriptive qualitative. The descriptive research conducted aims to create a systematic, factual, and accurate description or picture of the preferences for using QRIS among MSMEs in Bandung City. Based on the results of the analysis, it was found that the identification of actors, goals, and resources in rational choices including MSME actors, MSME consumers, payment service providers (PJP), Bank Indonesia and the Bandung City Government led to choosing to use QRIS transactions to achieve their respective goals.

Keywords: Rational Choice, QRIS, MSMEs

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari, masyarakat dituntut untuk terus beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah kemajuan teknologi dalam cara pembayaran. QRIS memiliki beberapa keunggulan, antara lain akses yang lebih mudah, biaya yang lebih rendah, serta kemudahan integrasi dengan berbagai platform pembayaran digital lainnya (Setiawan, 2022). Melalui penggunaan QRIS, pelaku usaha kecil diharapkan dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan pendapatan. Namun, tingkat adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha kecil di pedesaan masih relatif rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknologi dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital (Hasanah & Susanti, 2023). Berbeda dengan masyarakat perkotaan, contohnya adalah di Kota Bandung yang masyarakatnya memiliki karakteristik perkotaan. Menurut Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, saat ini transaksi QRIS di Jabar mencapai Rp90,86 triliun dengan volume transaksi sebesar 873,36 juta per September 2024. Tentu ini adalah modal yang penting bagi kita karena sekarang dengan digitalisasi kita meyakini ekonomi akan semakin lebih efisien. Jumlah merchant QRIS di Jawa Barat mencapai 7,5 juta atau sekitar 21 persen dari total merchant nasional yang mencapai 34 juta. Sementara itu, jumlah pengguna QRIS di provinsi ini mencapai 11,8 juta atau sekitar 22 persen dari total pengguna nasional yang telah mencapai 53 juta (bi.go.id) Penggunaan QRIS yang cukup tinggi di Jawa Barat menjadi suatu hal yang perlu untuk diteliti terkait dengan faktor apa saja yang memengaruhi keputusan baik dari sisi pemilik usaha dan konsumen bertransaksi menggunakan QRIS. Hal ini dapat dikaji menggunakan teori pilihan rasional. Coleman berpendapat bahwa tindakan sosial dapat dijelaskan sebagai hasil dari pilihan individu yang rasional, di mana individu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka berdasarkan preferensi dan sumber daya yang mereka miliki.

Unsur utama dari teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Dimana aktor merupakan sebuah individu yang melakukan sebuah tindakan dan individu ini juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan melakan tindakan tersebut.

Dari tindakan tersebut, diharapkan akan menghasilkan sebuah perubahan sosial. Aktor dalam mencapai tujuannya juga memanfaatkan dan mengontrol segala sumber daya yang ada atau dimiliki supaya tujuannya tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yang dilakukan bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran umum secara sistematis, sesuai lapangan, dan akurat mengenai Preferensi Penggunaan QRIS pada pelaku UMKM dan konsumen di Kota Bandung menggunakan teori pilihan rasional dari James Coleman.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer kepada para pelaku usaha kecil mikro menengah dan juga konsumen di Kota Bandung. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen (Moleong, 1998), dan diskusi kelompok terfokus (Irwanto, 2006) untuk mengidentifikasi preferensi penggunaan Qris pada pelaku UMKM dan konsumen di Kota Bandung. Diskusi sebagai metode yang dikembangkan dalam pemikiran bagaimana preferensi penggunaan Qris di UMKM telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta dari subyek kasus yang dikumpulkan selama kerja lapangan, kemudian dicarikan teori acuan (Nasution, 1988).

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 39 orang yang terdiri dari 12 UMKM, 11 konsumen, 11 PJP, dan 5 pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya material untuk mensejahterakan individu atau kelompok masyarakat (Deliarnov, 2016). Perekonomian sangat erat kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa yang menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan dimana manusia mengolah dan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah kegiatan jual beli yang melibatkan aktifitas transaksi, tersedia beragam pilihan dalam bertransaksi yaitu transaksi tunai dan non-tunai. Transaksi tunai meliputi kegiatan tukar menukar uang tunai secara

fisik, dan transaksi non-tunai dapat dilakukan melalui Qris atau kartu debit dan kredit. Saat ini, UMKM umumnya sudah menyediakan layanan pembayaran transaksi melalui non-tunai. Berdasar hasil wawancara, hal ini dilakukan karena pelaku usaha merasa saat ini semakin jarang konsumen yang membawa uang cash. Tak jarang calon konsumen urung membeli karena tidak membawa uang cash dan tidak tersedia pembayaran non-tunai.

Dari sisi konsumen, berdasar hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan mereka saat ini sangat jarang membawa uang cash. Mereka lebih memilih membawa *handphone* untuk alat komunikasi yang saat ini dapat dijadikan alat bayar menggunakan aplikasi *m-banking* yaitu fitur Qris yang juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran. Mereka kadang lupa membawa cash, untuk membayar tarif parkir pun mereka kadang kesulitan karena tidak membawa cash.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. UMKM juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp300 juta sampai paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp. 50 miliar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dan strategis dalam mendorong pertumbuhan serta peningkatan ekonomi di tingkat daerah. Kontribusinya tidak hanya terukur dari sisi angka, tetapi juga dampak sosial dan kemandirian ekonomi yang diciptakannya. Terdapat beberapa peran utama UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah diantaranya penciptaan lapangan kerja, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di berbagai daerah. Kemampuannya untuk membuka lapangan kerja baru, bahkan dengan modal yang relatif kecil, sangat signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh UMKM, mulai dari produksi barang hingga penyediaan jasa, secara langsung berkontribusi pada peningkatan PDRB suatu daerah. Semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang, semakin besar pula sumbangsuhnya terhadap output ekonomi regional. Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yakni keberadaan UMKM yang tersebar hingga ke pelosok daerah membantu dalam distribusi pendapatan yang lebih merata. UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat di berbagai lapisan untuk memperoleh penghasilan dan keluar dari jerat kemiskinan. Penggerak ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya lokal, maka UMKM seringkali memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia di daerahnya. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan potensi lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari

luar daerah, sehingga memperkuat struktur ekonomi lokal.

UMKM berperan dalam mendorong inovasi dan kreativitas lokal, yakni banyak UMKM lahir dari inovasi dan kreativitas dalam mengolah produk atau jasa yang unik dan memiliki ciri khas daerah. Ini mendorong munculnya produk-produk unggulan daerah yang memiliki daya saing. Membangun ketahanan ekonomi daerah, yakni UMKM cenderung lebih fleksibel dan tahan banting dalam menghadapi gejolak ekonomi dibandingkan usaha skala besar. Keberadaan UMKM yang kuat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama saat terjadi krisis. Adapun dalam hal menciptakan efek ganda (*Multiplier effect*), pertumbuhan UMKM dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah. Keberhasilan UMKM seringkali memicu pertumbuhan sektor pendukung lainnya seperti sektor keuangan melalui kebutuhan akan modal dan layanan perbankan, sektor logistik, dan sektor pariwisata jika produk UMKM menjadi daya tarik wisata

Dengan peran yang begitu sentral, dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan agar UMKM dapat terus tumbuh, berkembang, dan semakin optimal dalam mengakselerasi peningkatan ekonomi daerah. Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi pemasaran menjadi kunci untuk memaksimalkan kontribusi mereka.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung menunjukkan tren yang dinamis, dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah kota dan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhannya. Berikut adalah data dan indikasi peningkatan UMKM di Kota Bandung, jumlah UMKM dan usaha mikro tahun 2023 tercatat 10.107 UMKM di Kota Bandung, dengan 9.627 di antaranya adalah usaha mikro. Data historis (2016-2023) Portal Satu Data Indonesia mencatat data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandung dari tahun 2016 hingga 2023. Meskipun data detail tahunan tidak disajikan secara langsung, keberadaan dataset ini menunjukkan upaya pendataan yang berkelanjutan. (Portal Satu Data Indonesia, Juni 2024). Di tahun 2024, Pemerintah Kota Bandung menargetkan penerbitan 81.301 NIB sepanjang tahun 2024 untuk pelaku UMKM. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam legalisasi dan formalisasi UMKM, yang merupakan langkah penting untuk pengembangan usaha. (ANTARA News, Januari 2025)

Sektor dominan yang ada di Kota Bandung saat ini tercatat sektor kuliner terus menjadi dominan di Kota Bandung. Pada tahun 2023, tercatat 4.024 unit usaha mikro di sektor kuliner. Angka ini meningkat dari 3.464 unit pada tahun 2022. Sektor fashion juga menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2023, terdapat 1.516 unit usaha mikro di sektor fashion, meningkat dari 1.352 unit pada tahun 2022. Sektor perdagangan juga signifikan, dengan 1.598 unit usaha mikro pada tahun 2022. Jasa dan Handicraft: Sektor jasa dan handicraft juga menunjukkan peningkatan jumlah unit usaha mikro dari tahun 2022 ke 2023. (Open Data Kota Bandung, data UMKM berdasarkan jenis usaha). UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Kota Bandung, menyumbang sekitar 80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kota Bandung. (Direktorat Jenderal Pajak, Oktober 2019)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung aktif melakukan pembinaan. Pada tahun 2019, terdapat 6.201 UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DJP Jawa Barat I, menyelenggarakan program *Business Development Services (BDS)* untuk mendorong pengembangan UMKM secara berkelanjutan, termasuk pelatihan, seminar, bazar, dan bimbingan. (Direktorat Jenderal Pajak, Oktober 2019) Adanya "Calendar of Event" tahun 2024 dengan 42 event, termasuk 10 event unggulan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk UMKM. Tren peningkatan UMKM di Kota Bandung sangat jelas terlihat dari jumlah NIB yang diterbitkan, pertumbuhan di sektor-sektor kunci, dan berbagai program dukungan pemerintah. UMKM menjadi pilar ekonomi yang vital bagi Kota Bandung.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standarisasi dari pembayaran dengan metode QR Code dari Bank Indonesia yang dibuat untuk memfasilitasi metode pembayaran digital yang efisien, aman, terintegrasi (Bank Indonesia : QRIS. Bank Indonesia Official Website).

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mulai diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. Penerapannya secara resmi diwajibkan pada 1 Januari 2020 untuk semua penyedia jasa pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Tujuan utama peluncuran ini adalah untuk menciptakan standar pembayaran digital yang universal dan mendukung inklusi

keuangan. Pada saat diluncurkan, Agustus 2019, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, penyedia jasa pembayaran (PJP), dan masyarakat untuk memperkenalkan manfaat dan cara penggunaan QRIS. Pada 1 Januari 2020, seluruh PJP yang menggunakan kode QR diwajibkan untuk mengadopsi QRIS. Standar ini mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja sehingga dapat digunakan pada satu kode QR yang sama.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendukung transformasi ekonomi digital dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran berbasis QR dalam satu standar. Hal ini mengurangi fragmentasi sistem pembayaran, sehingga transaksi menjadi lebih sederhana dan efisien. Dengan QRIS, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran apa saja, tanpa memerlukan kode QR yang berbeda-beda untuk setiap platform. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. QRIS mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sistem perbankan formal.

QRIS juga memiliki karakteristik, menurut Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam website resminya menyatakan bahwa karakteristik QRIS adalah UNGGUL yaitu Universal yakni QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code. Gampang yakni penggunaan QRIS yang sangat simpel hanya melalui proses scan, klik dan bayar. Juga dapat diakses oleh berbagai handphone yang memiliki kamera dan memiliki kemampuan untuk scan barcode. Untung yakni pengguna dan Merchant yang memakai QRIS dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar dan dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk menerima pembayaran. Langsung yakni pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika tanpa membutuhkan waktu yang lama.

Teori pilihan rasional melihat kepentingan individu sebagai sesuatu yang sudah ada dan berusaha untuk mempertimbangkan bagaimana kepentingan sosial sistem berfungsi. Ide dasar Coleman mengenai pilihan rasional yaitu bahwa tindakan atau perilaku seseorang

dipengaruhi oleh suatu pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan, sehingga pilihan dalam bertindak terbentuk dari tujuan tersebut (1990: 13). Coleman menggunakan konseptualisasi ekonomi, yaitu gagasan bahwa aktor memilih tindakan yang bermanfaat bagi mereka untuk pemuasan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (1990b: 14).

Aktor dan sumber daya adalah dua komponen utama teori pilihan rasional. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh aktor. Keberadaan sumber daya ini yang menyebabkan terjadinya sistem. Coleman menjelaskan bagaimana suatu sistem dapat terbentuk: setidaknya ada dua orang dalam tindakan sosial yang memiliki sumber daya yang diinginkan atau dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Karena adanya sumber daya yang diinginkan dari aktor lain, terjadilah kerjasama, ketergantungan, dan tindakan sistematis.

Menurut Nane (2007), teori pilihan rasional menggambarkan perilaku manusia sebagai akibat dari preferensi individu yang mementingkan diri sendiri. Individu menghitung dan membuat strategi, dan dengan hati-hati menimbang biaya dan keuntungan dari tindakan tertentu sebelum mengambil tindakan tersebut. Memaksimalkan utilitas adalah tujuan setiap orang, tujuan apapun yang membuat aktor merasa puas baik itu mendapatkan uang atau kekuasaan.

Aktor rasional adalah individu atau kelompok yang bertindak dengan tujuan tertentu, dan tindakan mereka didasarkan pada penilaian rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Konsep ini berakar pada pendekatan ekonomi mikro yang memandang individu sebagai pengambil keputusan yang rasional, yang bertindak untuk mencapai tujuan pribadi mereka dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat. Dalam konteks sosial, individu tidak hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, norma, dan struktur sosial yang ada di sekitar mereka.

Menurut teori Coleman, aktor rasional bertindak dalam konteks sosial, bukan dalam kekosongan. Teorinya menyatakan bahwa aktor rasional mengambil keputusan berdasarkan dua faktor utama: informasi yang tersedia dan pilihan yang ada. Menurut teori ini, seseorang akan mengumpulkan informasi yang relevan tentang pilihan yang tersedia, kemudian menilai manfaat dan biaya dari setiap pilihan tersebut untuk membuat keputusan yang memberikan hasil

terbaik bagi mereka. Sebaliknya, keterbatasan informasi mereka dan efek interaksi mereka dengan anggota masyarakat lainnya mempengaruhi pertimbangan pribadi mereka.

Individu mempunyai akses ke sumber daya tertentu, baik material ataupun non-material yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Keterbatasan adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan yang bisa diambil individu. Sumber daya adalah komponen yang dapat digunakan oleh seorang aktor yang rasional untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks sosial, sumber daya dapat berupa berbagai hal, seperti akses ke informasi, kekayaan, keterampilan, atau keahlian, serta jaringan sosial yang mendukung seorang aktor dalam mencapai tujuannya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh seorang aktor, semakin besar kemungkinan mereka untuk memilih opsi yang lebih menguntungkan. Coleman menggarisbawahi bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka secara rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam masyarakat atau organisasi yang lebih besar, pembagian dan pengelolaan sumber daya ini juga dapat mempengaruhi bagaimana individu membuat keputusan yang rasional dalam konteks sosial mereka.

Tindakan terencana merujuk pada perilaku individu yang berdasarkan keputusan rasional untuk mencapai tujuan. Coleman mengatakan bahwa orang bertindak dengan cara yang rasional dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Dalam hal ini, tindakan terencana berarti bahwa orang tidak hanya bertindak berdasarkan insting atau reaksi spontan, tetapi lebih dari perencanaan yang disengaja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, orang berusaha untuk mengevaluasi situasi secara rasional, menemukan tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, dalam teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James Coleman, tindakan terencana mencerminkan upaya aktor rasional untuk mencapai tujuan mereka dengan merencanakan dan memilih tindakan yang paling menguntungkan berdasarkan analisis rasional terhadap pilihan yang tersedia. Tetapi keterbatasan informasi, sumber daya, dan pengaruh sosial di masyarakat tersebut selalu mempengaruhi tindakan ini.

HASIL LAPANGAN DAN TINJAUAN TEORITIS

1. Identifikasi Aktor, Tujuan, dan Sumber Daya dalam Pilihan Rasional

Konsumen UMKM di Kota Bandung bertujuan dalam bertransaksi menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan transaksi, mendapatkan promo/diskon (*cashback*) yang seringkali ditawarkan oleh pelaku UMKM. Hal yang rasional apabila sebagai konsumen ingin mendapatkan harga semurah-murahnya dalam pembelian dan promo ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan mereka memilih transaksi non-tunai menggunakan Qris. Selain itu efisiensi (tidak perlu uang kembalian), kontrol pengeluaran (catatan transaksi) yang tercatat melalui riwayat transaksi pada fitur m-banking menjadi hal yang juga merupakan tujuan dari dipilihnya transaksi non-tunai dalam kegiatan pembelian, dan juga dalam mengantisipasi uang palsu. Sehingga preferensi dalam memilih metode pembayaran yang paling efisien, paling aman, dan paling menguntungkan secara finansial. Sumber daya bagi konsumen dalam hal ini meliputi *smartphone*, akses internet, saldo di rekening bank/*e-wallet*, pengetahuan tentang penggunaan aplikasi.

Pelaku UMKM di Bandung menyediakan pembayaran non-tunai dengan memasang Qris bertujuan meningkatkan penjualan, efisiensi operasional yang tidak perlu menyediakan uang kembalian, adapun pembukuan otomatis yang bermanfaat bagi pelaku UMKM, keamanan yang dalam hal ini dapat meminimalisir risiko pencurian uang tunai, perluasan jangkauan pasar yang menarik konsumen yang memiliki preferensi untuk *cashless*, serta berpeluang mendapatkan insentif dari bank atau Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Dari perspektif pilihan rasional, pelaku UMKM memilih metode pembayaran yang paling mudah diimplementasikan, paling murah biaya transaksinya, dan paling banyak digunakan oleh pelanggan mereka. Sumberdaya bagi pelaku UMKM dalam hal ini meliputi *smartphone/tablet*, akses internet, rekening bank, pemahaman teknis, biaya MDR (*Merchant Discount Rate*), fasilitas pelatihan dari PJP.

Penyedia Jasa Pembayaran (Bank, E-wallet, Fintech) bertujuan mengakuisisi pengguna yakni konsumen dan merchant, peningkatan volume transaksi, pengumpulan data transaksi yang berfungsi untuk pengembangan produk atau layanan lain, profit atau layanan bernilai tambah. Dalam hal ini preferensi penyedia jasa pembayaran untuk menciptakan sistem Qris yang

paling *user-friendly*, aman, dan menawarkan insentif menarik. Sumber daya yang relevan bagi PJP dalam hal ini meliputi teknologi infrastruktur (server, jaringan), SDM, modal untuk promo/*cashback*, jaringan *merchant*, dan lisensi dari BI.

Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Kota Bandung bertujuan mendorong inklusi keuangan, efisiensi sistem pembayaran nasional, mengurangi peredaran uang tunai, meningkatkan transparansi transaksi, penerimaan pajak khususnya Pemerintah Kota Bandung, seperti uji coba parkir Qris, dan mendukung pembangunan ekonomi digital. Preferensi BI dan Pemkot Bandung untuk membuat regulasi yang mendukung, melakukan sosialisasi masif, dan menyediakan infrastruktur yang andal. Sumber daya bagi BI & Pemkot Bandung dalam hal ini kewenangan regulasi, sumber daya finansial untuk sosialisasi/infrastruktur, data ekonomi.

2. Peran Lingkungan Sosial dalam pengambilan Keputusan Rasional

Peran lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan rasional meliputi norma sosial bahwa semakin banyak orang di Bandung yang menggunakan QRIS, semakin besar tekanan atau dorongan sosial bagi individu lain untuk mengadopsi agar tidak ketinggalan (fenomena "*fear of missing out*" atau FOMO). Jaringan sosial dalam hal ini rekomendasi dari teman, keluarga, atau sesama pedagang dapat memengaruhi keputusan adopsi. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini kebijakan Pemkot Bandung untuk mendorong penggunaan QRIS misalnya, pembayaran parkir atau retribusi, akan meningkatkan insentif bagi warga dan pedagang untuk menggunakannya. Melalui akumulasi pilihan rasional individu meliputi konsumen, pedagang, PJP yang terjadi di Kota Bandung, kita dapat melihat fenomena makro yaitu meningkatnya adopsi QRIS secara signifikan di Bandung. Jika banyak konsumen di Bandung menemukan bahwa menggunakan QRIS memberikan manfaat lebih besar, frekuensi transaksi QRIS akan meningkat. Peningkatan frekuensi transaksi konsumen akan memberikan insentif bagi lebih banyak pedagang untuk menyediakan QRIS, karena mereka melihat potensi keuntungan. PJP akan terus berinvestasi dan berinovasi dalam QRIS karena melihat pasar yang berkembang di Bandung. BI dan Pemkot Bandung akan semakin masif dalam program literasi dan kebijakan digitalisasi karena melihat penerimaan yang baik. Hal ini menciptakan

lingkaran umpan balik positif di mana pilihan rasional di tingkat mikro berkontribusi pada perubahan struktural di tingkat makro, dan sebaliknya.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan literasi di berbagai tempat, harapannya hal ini dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat karena melihat pasar yang berkembang di Kota Bandung ini" AS, Pemerintah, 49 tahun

3. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM, sebagai salah satu target utama pengguna QRIS, kerap menemui berbagai tantangan dalam mengadopsi dan menggunakan metode pembayaran ini. Beberapa kendala utama meliputi konektivitas internet yang tidak stabil yakni ketergantungan QRIS pada koneksi internet menjadi masalah signifikan, terutama di daerah dengan infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Transaksi dapat tertunda atau bahkan gagal jika koneksi internet lambat atau tidak stabil. Biaya transaksi (MDR): Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan pada setiap transaksi QRIS, meskipun bertujuan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem, terkadang dianggap memberatkan bagi sebagian UMKM, terutama yang memiliki margin keuntungan tipis. Hal ini dapat mengurangi pendapatan bersih yang diterima.

Kendala selanjutnya adalah dalam proses penyelesaian dana (Settlement), beberapa pelaku UMKM mengeluhkan waktu penyelesaian dana yang tidak langsung masuk ke rekening mereka setelah transaksi berhasil. Penundaan ini dapat mempengaruhi arus kas usaha. Kurangnya pemahaman dan edukasi yang mengartikan bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara kerja, manfaat, dan pengelolaan transaksi QRIS. Kurangnya literasi digital dan sosialisasi menjadi penghambat adopsi yang lebih luas. Kendala lainnya adalah perihal masalah teknis dan keamanan yakni timbulnya isu teknis seperti gagal pindai (scan) QR code, aplikasi yang *error*, atau kekhawatiran akan keamanan transaksi digital, termasuk potensi penipuan, masih menjadi perhatian. Beberapa UMKM juga khawatir akan kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi transaksi.

"Sering terjadi permasalahan pembayaran yang sumbernya sebenarnya bukan di pedagang. Kalau isu keamanan memang ada tapi yang paling ering terjadi adalah masalah teknis pembayaran" – AJ, pedagang UMKM, 23 tahun.

“Saya merasa sangat dimudahkan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran, namun perlu menjadi perhatian terkait kendala sistem. BEberapa kali saya ter debet uang namun tidak masuk di penjual dan itu makan waktu cukup lama untuk mengurusnya” – FF, Konsumen UMKM, 25 tahun.

Keterbatasan perangkat pendukung yaitu tidak semua UMKM memiliki perangkat smartphone yang memadai atau terbiasa menggunakan teknologi digital untuk operasional usaha mereka. Meskipun proses transaksi digital secara umum sering dilakukan, namun bagi sebagian kecil UMKM, terutama di sektor tradisional atau dengan skala usaha sangat kecil, masih lebih nyaman dan terbiasa dengan transaksi menggunakan uang tunai dan siap mengelola risiko risiko yang ditimbulkan.

Apabila dilihat dari sisi konsumen, penggunaan QRIS juga tidak luput dari berbagai tantangan dalam preferensi pemilihannya menggunakan QRIS sebagai cara membayar secara digital, berdasar hasil wawancara yang dilakukan terdapat kendala perihal ketergantungan pada jaringan internet dan perangkat, sama seperti UMKM, konsumen juga membutuhkan koneksi internet yang stabil dan smartphone yang mendukung aplikasi pembayaran untuk dapat melakukan transaksi QRIS. Gangguan sinyal atau baterai lemah bisa menjadi kendala. Belum seluruh merchant menerima QRIS, meskipun penetrasinya terus meningkat, belum semua merchant, terutama pedagang kecil atau di lokasi tertentu, menyediakan opsi pembayaran melalui QRIS. Hal ini membatasi pilihan konsumen. Tak jarang konsumen tidak jadi membeli suatu barang yang dituju di awal dikarenakan tidak tersedianya pilihan untuk membayar dengan Qris. Kendala lainnya adalah permasalahan pada aplikasi pembayaran, konsumen dapat mengalami kendala teknis pada aplikasi pembayaran digital yang mereka gunakan, seperti aplikasi yang lambat, sulit dibuka, atau gagal melakukan pemindaian QR code. Kekhawatiran keamanan dan privasi juga menjadi salah satu isu keamanan seperti modus penipuan dengan QR code palsu (*quishing*) atau penyalahgunaan data pribadi masih menjadi kekhawatiran sebagian konsumen dalam bertransaksi digital. Kurangnya Pemahaman Cara Penggunaan, bagi sebagian konsumen, terutama dari kalangan usia lanjut atau yang kurang terpapar teknologi, mungkin masih bingung atau belum terbiasa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

Kendala lainnya terkait preferensi

pembayaran dengan Qris adalah batas nominal transaksi, beberapa layanan pembayaran digital memiliki batas nominal transaksi harian atau per transaksi menggunakan QRIS, yang mungkin tidak mencukupi untuk pembelian barang atau jasa dengan nilai besar. Kesulitan saat QR Code rusak atau tidak jelas juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh konsumen saat menjatuhkan pilihannya pada cara membayar menggunakan Qri. Tak jarang terjadi saat transaksi QR code yang dicetak dengan kualitas buruk, rusak, atau ditempatkan di lokasi dengan pencahayaan minim dapat menyulitkan proses pemindaian oleh konsumen. Meskipun terdapat berbagai kendala, baik pemerintah, regulator, maupun penyedia layanan pembayaran terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas edukasi, dan memperkuat infrastruktur pendukung QRIS. Diharapkan dengan berbagai perbaikan tersebut, adopsi QRIS dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku ekonomi di Indonesia.

“Harga makanan kita kurang dari 10.000, sementara untuk pembayaran digital beberapa memiliki nominal minimal.” HN, pedagang UMKM, 30 tahun

4. Dampak Positif Preferensi Penggunaan QRIS bagi Perekonomian

Preferensi terhadap QRIS juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, yaitu mendorong inklusi keuangan, QRIS memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal untuk masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital melalui berbagai aplikasi *e-wallet*. Efisiensi sistem pembayaran nasional, menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan terstandarisasi di seluruh Indonesia. Dapat juga mendukung gerakan nasional non-tunai (GNNT) yaitu mendorong terciptanya *less cash society*, yang dapat mengurangi biaya pencetakan dan pengelolaan uang fisik secara nasional. Peningkatan transparansi transaksi karena transaksi digital yang tercatat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat membantu mengurangi potensi ekonomi informal yang tidak tercatat. Preferensi penggunaan Qris juga dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, dengan mempermudah transaksi bagi konsumen dan UMKM, QRIS turut mendorong perputaran uang dan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kehadiran QRIS memacu inovasi di

sektor teknologi finansial (fintech) dan layanan pembayaran digital lainnya. Melalui implementasi QRIS antarnegara, wisatawan mancanegara dapat bertransaksi dengan mudah di Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asal mereka, dan sebaliknya, mendukung UMKM yang bergerak di sektor pariwisata. Secara keseluruhan, meningkatnya preferensi terhadap pembayaran menggunakan QRIS merupakan langkah positif menuju digitalisasi ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan modern, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku ekonomi di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam konteks Kota Bandung, beberapa hal yang bisa menjadi inti dari preferensi pelaku UMKM dan kosumen dalam penggunaan Qris ditinjau dari teori pilihan rasional adalah dinamika UMKM di Bandung yakni Bagaimana UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Bandung, membuat keputusan rasional dalam mengadopsi QRIS, mempertimbangkan skala usaha, modal, dan target pasar mereka. Selanjutnya adalah inisiatif Pemkot Bandung, dalam hal ini analisis keputusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan QRIS untuk layanan perdagangan dan layanan publik dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi pilihan rasional warga. Perlu juga diperhatikan agar tidak terdapat gap atau kesenjangan dari rentan usia dimana generasi lebih tua yang masih mempertimbangkan faktor keamanan dan kebiasaan melakukan transaksi tunai sementara generasi muda yang mungkin lebih hi-tech dan mencari kemudahan transaksi. Perbandingan dengan metode pembayaran non-tunai lain meliputi bagaimana QRIS dibandingkan dengan kartu debit/kredit, atau *e-wallet* lainnya dalam hal biaya, manfaat, dan preferensi di mata aktor-aktor di Bandung. Dengan menggunakan teori pilihan rasional James Coleman, peneliti dapat menggali mengapa aktor-aktor di Bandung memilih atau tidak memilih untuk menggunakan QRIS, dan bagaimana pilihan-pilihan individual ini secara kolektif membentuk pola penggunaan QRIS di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, Hill, Stephen dan Turner, Bryan, 2010, Kamus Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ariani, A & Utomo, M. Nur. 2017. Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 13 (2): 99-118.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp.
- Henley, William. 2017. *Peluang UMKM dan Perbaikan Ketimpangan*. Kontan.co.id. 20 Februari. https://m.kontan.co.id/news_analisis/peluang-umkm-dan-perbaikan-ketimpangan?page=2
- Murdani, M., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi di kelurahan kandri kecamatan gunungpati kota semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152-157. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17893>
- Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman korupsi dalam teori pilihan rasional dan hubungan prinsipal-agen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 139-151
- Ritzer, George & Godman, J.Douglas, 2003, *Teori Sosiologi Modern edisi ke 7*, Jakarta: Prenada Media
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Sociological theory*. SAGE Publications.
- Setyanto, A. Rakhman., Samudro, B. Rizky., & Pratama, Y. Pasca. 2015. Kajian Pola Pengembangan UMKM di Kampung Batik Laweyan Melalui Modal Sosial dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*. 15 (2) : 71-90.
- Sugiyono. 2014. *Objek Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Teknik pengumpulan data*. Bandung: Alfabeta
- Susilo, Y. Sri. 2010. Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Implementasi Cafta Dan MEA. *UPN Veteran Yogyakarta*. 8 (2) : 70-78.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiharttati, Rahma, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada